

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Keberadaan (<https://Kemlu.go.id/canbera/id/read/indonesia/2186/etc-menu>) infrastruktur akan mendorong peningkatan produktifitas faktor-faktor produksi, memperpanjang mobilitas penduduk, barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah (Nurmansyah, 2011).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga merupakan negara ke-4 terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, seperti yang dikutip dari link

Diakses pada tanggal 8 Agustus 2021, pada pukul 12.29 WITA). Sehingga Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai masalah sosial antara lain seperti, kemiskinan dan kurangnya infrastruktur. Masalah kurangnya infrastruktur dan kemiskinan di Indonesia paling relatif banyak terdapat di perdesaan, khususnya desa terpencil apalagi desa yang berada di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal yang paling merasakan permasalahan ini. Hal tersebut bertolak belakang dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang salah satunya mengamanatkan bahwa “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Yang artinya bahwa kemiskinan merupakan tanggung jawab negara yang dimaksud

disini adalah pemerintah negara itu sendiri. Untuk membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu adanya sarana yang dapat mendukungnya seperti infrastruktur. Infrastruktur merupakan sarana yang paling dibutuhkan dalam perkembangan suatu wilayah, baik itu perkotaan maupun pedesaan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah kepulauan Indonesia yang memiliki luas wilayah daratan 4.734.990 ha tersebar pada 1.192 pulau yang terdiri dari 43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni. Provinsi NTT terdiri dari 20 kabupaten dan 1 kota yang terletak di tujuh pulau besar, yaitu pulau Sumba, Timor, Flores, Alor, Lembata, Rote, dan Sabu. Setiap pulau memiliki sumber daya yang sangat melimpah yang dapat dieksploitasi mulai dari sumber daya alam sampai manusia (NTT dalam angka- PBS NTT, 2014).

Kecamatan Insana Barat merupakan salah satu Kecamatan dari 24 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Utara. Keterbatasan infrastruktur sudah menjadi masalah lama yang dihadapi oleh pedesaan terutama dalam pembangunan pedesaan. Untuk menangani masalah infrastruktur sebaiknya ditangani berdasarkan kebutuhan dan ketepatangunaan. Maksud dari kebutuhan ialah, infrastruktur yang akan dibangun sesuai dengan apa yang masyarakat desa itu butuhkan dan nantinya akan terkait dengan masalah ketepatangunaan. Apabila infastruktur tersebut dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa maka kegunaan dari pembangunan infastruktur itu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pembangunan pedesaan, infrastruktur merupakan salah satu kendalanya. Ketertinggalan pembangunan berbagai infrastruktur di pedesaan mengakibatkan keterbatasan masyarakat desa dalam berkomunikasi, produksi dan mengakses informasi. Hal ini merupakan hambatan dalam mengakses dan keterbatasan kemampuan. Salah satu contohnya adalah akses fisik yang tidak layak karena buruknya infastruktur seperti jalan. Jalan yang buruk akan

menghambat kegiatan masyarakat pedesaan, membatasi pemasaran produk yang dihasilkan, atau dapat juga menghambat perjalanan wisatawan jika wilayah tersebut memiliki obyek wisata yang menarik. Lebih dari itu, keterbatasan ketersediaan jaringan jalan yang memadai juga akan mengurangi daya tarik investasi baik yang berasal dari lokal maupun yang dari luar.

Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 No. 23 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang).

Pertanian adalah kegiatan utama di pedesaan, dan banyak desa yang hingga sekarang kesulitan untuk menjangkau ke lahan pertanian, sehingga harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk menjangkau lahan pertanian, terlebih lagi ketika masyarakat ingin membawa hasil tani tersebut dari ladang ke tempat penyimpanan atau dari ladang ke konsumen. Hal tersebut terjadi karena minimnya infrastruktur fisik yang tersedia di pedesaan, sehingga wajar jika masyarakat desa yang mayoritas penduduknya memiliki penghasilan dari pertanian mengalami hambatan dalam menjangkau lahannya sehingga memiliki pengeluaran yang besar untuk menjangkaunya dan penghasilan yang tidak lebih besar daripada pegeluarannya.

Oleh karena itu, banyaknya penduduk miskin di desa juga dipengaruhi karena keterbatasan infrastruktur fisik yang dibangun di desa. Infrastruktur yang terbatas menyebabkan kemiskinan di pedesaan merupakan suatu masalah yang serius di Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Dari banyaknya pengangguran hingga melemahnya kegiatan ekonomi dan memburuknya layanan pendidikan ataupun kesehatan. Kemiskinan itu sendiri

didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan serta mengembangkan kehidupan yang layak (Bappenas, 2004).

Hak-hak dasar yaitu hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan juga hak yang diakui dalam perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui itu antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun lelaki (Bappenas, 2004).

Oleh karena itu, dengan pembangunan infrastruktur pedesaan yang memiliki karakteristik yang cukup banyak sektor pertanian. Adapun sarana dan prasarana pembangunan untuk kemudahan akses masyarakat untuk mobilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melakukan pengerasan jalan, pengaspalan dan pembetonan jalan serta pembuatan sumur bor yang berfungsi untuk menjaga kenyamanan pedesaan dalam mengakses fasilitas pembangunan tersebut. Dalam hal ini peneliti ingin membahas mengenai keefektivitasan pelaksanaan dari pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Letneo.

Pengadaan sumur bor kepada masyarakat Desa Letneo, yang beberapa tahun sebelumnya mengalami krisis air bersih. Masalah air bersih menjadi semakin parah pada musim kemarau tiba. Bila terjadi kemarau panjang, maka pasti akan merupakan bencana besar bagi masyarakat Desa Letneo. Dimana musim kemarau panjang terjadi banyak permasalahan timbul dan mengakibatkan masyarakat Desa Letneo, banyak yang mengalami krisis air bersih, sehingga banyak masyarakat Desa Letneo yang tidak mengkonsumsi air bersih dan membuat masyarakat Desa Letneo kesulitan dalam mengolah lahan perkebunannya. Dengan adanya

pembangunan infrastruktur berupa pengadaan pembangunan 4 (Empat) sumur Bor yang ada di Desa Letneo, masyarakat dari beberapa dusun sudah mulai merasakan manfaat dari pembangunan 3 (Tiga) sumur Bor yang telah selesai di bangun. Namun ada salah satu dusun yang belum merasakan manfaat pembangunan salah satu sumur Bor dikarenakan belum diadakan fasilitas perlengkapan sambungan pipa dari titik pembangunan sumur Bor menuju ke Bak penampung air yang ada di Dusun 3 (Tiga).

Gambar 1.1
Sumur Bor dan Bak Penampung air



Sumber Data: Dokumen Peneliti, (Rabu 25 februari 2022)

Ada pula pembangunan infrastruktur lain seperti Pengadaan Gedung PAUD bagi anak-anak di Desa Letneo, yang beberapa tahun sebelumnya masih menggunakan ruangan milik Sekolah Dasar Katolik Lansese dalam setiap melakukan proses belajar sehari-hari. Dan dengan di adakan pembangunan gedung Paud, anak-anak sekarang sudah menggunakan Gedung tersebut sehari-hari dalam proses belajar. Namum masi kurangnya fasilitas pendukung seperti meja, kursi bagi anak-anak dalam ruangan tersebut dan proses belajar di dalam ruangan anak-anak masi menggunakan lantai untuk duduk, menulis dan menggambar.

Gambar 1.2
Gedung Paud TK Lansese



Sumber Data : Dokumen Peneliti, (25 februari 2022)

Pembangunan lain seperti Pengadaan Gedung Posyandu bagi Ibu-ibu hamil dan belita yang beberapa tahun sebelumnya selalu menggunakan salah satu lumbung milik warga dalam pertemuan dan pelayanan kesehatan bagi Ibu-ibu hamil dan belita. Dan dengan diadakan gedung posyandu tersebut masyarakat kini sudah dapat menggunakan Gedung tersebut dalam pertemuan dan pelayanan kesehatan bagi Ibu-ibu hamil dan belita. Namun masi kurangnya fasilitas pendukung seperti meja, kursi bagi Ibu-ibu hamil dan belita.

Gambar 1.3
Gedung posyandu



Sumber Data : Dokumen penelitian, (22 februari 2022)

Berdasarkan Data Profil Desa Letneo Tahun 2015-2019 tentang Detail Penggunaan Dana Desa Letneo terkait dengan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Detail Penggunaan Dana Desa Letneo Tahun 2015-2019
Tentang Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar

No	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	Volume/ Satuan	Tahun Detail Penggunaan Dana Desa	Jumlah Penggunaan Anggaran Dana Desa
1.	Sumur Bor dan Bangunan Pelengkap	3 Unit	2016	Rp. 135.442.887
2.	Pembangunan Gedung PAUD	1 Unit	2016	Rp. 141.724.854
3.	Pembangunan Gedung Posyandu	1 Unit	2017	Rp. 105.034.383
4.	Sumur Bor dan Bangunan Pelengkap	1 Unit	2018	Rp. 73.789.500
5.	Peningkatan instalasi Sumur Bor	1 Paket	2018	Rp. 88.169.600
6.	Pembangunan Gedung Posyandu	1 Unit	2019	Rp. 132.564.350

Sumber Data : Profil Penggunaan Dana Desa Letneo Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Letneo terkait dengan pengadaan Sumur Bor dan

Bangunan Pelengkap pada tahun 2016 dibangun 3 Unit, pada tahun 2018 dibangun 1 Unit total keseluruhan berjumlah 4 Unit Sumur Bor di Desa Letneo. Peningkatan Instalasi Sumur Bor pada tahun 2018 berjumlah 1 Paket, dan untuk Pembangunan Gedung Posyandu pada tahun 2017 dibangun 1 Unit dan tahun 2018 dibangun 1 Unit totalnya ada 2 Unit pembangunan Gedung Posyandu. Adapun pembangunan infrastruktur berupa Gedung PAUD pada tahun 2016 dibangun 1 Unit.

Adapun kendala yang dihadapi hingga saat ini di Desa Letneo, pembangunan infrastuktur terkait pengadaan sumur bor dan bangunan perlengkapan sumur bor yang sudah jelas dicantumkan pada detail penggunaan dana desa tahun 2015-2019 ini. Namun, masyarakat kurang puas karena dengan jumlah dana yang dikeluarkan sangat besar, tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di dusun lain belum sepenuhnya puas karena belum tersedianya sambungan pipa pengaliran air dari lokasi Sumur Bor ke salah satu dusun yang ada di wilayah Desa Letneo.

Untuk kegiatan pembangunan tahun 2020 sampai awal tahun 2022 dana desa yang didapatkan dari Pemerintah Pusat lebih memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat akibat adanya dampak Pandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia dan untuk pembangunan infrastuktur ditiadakan. Dana desa yang diperoleh Desa Letneo dari Pemerintah Pusat hanya dibagikan kepada masyarakat berupa uang tunai dan pembagian bak air penampung (viber) bagi setiap kepala keluarga di Desa Letneo.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka sungguh menarik untuk dibahas tentang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LETNEO KECAMATAN INSANA BARAT KABUPATEN TIMOR TEGAH UTARA)”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Letneo Kecamatan Insana Barat kabupaten Timor Tengah Utara” ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Letneo kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara oleh satuan kerja yang berada di garis fungsional Organisasi Pemerintah Desa, dalam upaya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan penulis tentang efektivitas dari pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Sebagai bahan informasi bagi yang melakukan penelitian lanjutan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan (input) bagi perangkat Desa Letneo Kecamatan Insana Barat dalam menjalankan pembangunan infrastruktur perdesaan.

